



# Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat

## Kemanakah Arah Pariwisata Cirebon?



## Turis



Siapa yang tak kenal turis? Turis biasa disematkan bagi mereka yang menyukai aktivitas rekreasi atau liburan.

Menurut Wikipedia, turis adalah seseorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km (50 mil) dari rumahnya dengan tujuan rekreasi maupun berwisata. Lalu sejak kapan aktivitas berwisata ini dimulai?

Dalam sejarah tercatat, pariwisata di Indonesia dimulai sejak masa kolonial. Kegiatan wisata pertama kali diadakan pada masa kolonial seiring dengan dikeluarkannya keputusan Gubernur Jenderal Belanda bernama VTV (Vereneiging Touristen Verker) sehingga dibukalah kegiatan berwisata ke Hindia Belanda (Indonesia-sekarang).

Pada awalnya kebijakan VTV ini dibentuk karena meningkatnya perdagangan antara dunia Eropa dengan negara-negara di Asia termasuk Indonesia.

Mereka menggunakan lautan Hindia menjadi jalur yang sering dilewati orang-orang asing yang pergi dengan berbagai alasan atau sesuai dengan keperluan masing-

masing, misalnya perdagangan.

Akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, banyak di antara orang-orang Eropa berkunjung ke Indonesia bukan hanya untuk bertransaksi. Mereka ingin berwisata ke beberapa tempat yang ada di Indonesia. Seiring waktu orang-orang tersebut dikenal dengan sebutan turis asing atau turis lokal.

Kiwari, berwisata seperti menjadi kebutuhan setiap orang. Dan setiap wilayah berlomba-lomba membuat wisata baru untuk mendatangkan turis. Bagaimana dengan pariwisata di Kabupaten Cirebon?

Oleh karenanya, kami tertarik untuk menyajikan kondisi pariwisata di Kabupaten Cirebon bagi pembaca setia, seiring dengan dihantarkannya rancangan perda induk pariwisata.

Selain isu utama, kami sajikan kilas kegiatan anggota DPRD Kabupaten Cirebon dalam kurun sebulan. Kami tentu menunggu masukan, saran dan kritik dari segenap pembaca budiman. Akhirnya kami ucapkan selamat membaca Cirebon Katon.

## Pembina/Penasehat :

**H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si**  
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Rudiana, SE**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Teguh Rusiana Merdeka, SH**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

**Drs. H. Subhan**  
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

## Pengarah :

**Hj Eriati**  
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

**Munawir, SH.**  
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

**H. Sofwan, S.T**  
(Ketua Komisi 1)

**R. Hasan Basori**  
(Ketua Komisi 2)

**Anton Maulana, S.T, M.M**  
(Ketua Komisi 3)

**Aan Setiawan, S.Si**  
(Ketua Komisi 4)

## Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

**Ikin Asikin, S.Sos, M.Si**  
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

## Wakil Pimpinan Redaksi :

**Drs. Raden Chaidir Sulianingrat**  
(Kabag Humas, Protokol, Kerjasama, dan Aspirasi)

**Nisa Afidah, SH**  
(Kabag Persidangan dan Perundang-undangan)

## Redaktur Pelaksana :

**Dra. Puti Amanah Sari**  
(Pj Kasubag Humas dan Protokol)

## Redaksi Ahli :

**S. Yudi**

## Penyunting :

**Dra. Puti Amanah Sari**  
(Kasubag Kerjasama dan Aspirasi)

## Redaktur :

**Yusuf**

## Reporter :

**Supardi • Kustano • Riyan • Amir**

## Fotografer :

**Qushoy**

## Desain Grafis :

**Boyke Datu • Andri**

## Data dan Riset :

**Oman**

## Distribusi :

**Firman • Misbah**

## Korespondensi:

**redaksi.cika@gmail.com**

## Penerbit :

**Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon**  
Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon  
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



## 04 | FOKUS

**Pariwisata Cirebon**  
**Lesu, Wisatawan Menurun**

## 8 | Hanifah:

**Perlu Intensifkan Pembinaan dan Promosi**



## 14 | KILAS

**Sambut Baik Edukasi Politik untuk Pelajar**



## 18 | PUBLIKA

**Krisis Air Warga Pesisir**



## 22 | LENSA

**Angkutan Umum**  
**Meski Terjal, Tetap Mengaspal**



## 24 | PROFIL

**Hj Rukyati S Pd**  
**Dijuluki Kepala Sekolah Pembangunan**

## 28 | DINAMIKA

**Siapkan Hibah Atasi Kelangkaan Blangko e-KTP**

30 | **Lutfhi: Sosok Pj Bupati Cirebon Harus Miliki Visi Seirama**

32 | **Tinjau Pembangunan Destinasi Wisata**

34 | **Inisiasi Raperda Kabupaten Layak Anak**



## 36 | POTENSI

**Mangrove Pengarengan**  
**Segera Hadirkan Wisata Edukasi**



## 38 | DESA

**Ciawijapura**  
**Akan Punya Bank Sampah**

## Pariwisata Cirebon Lesu, Wisatawan Menurun

Disbudpar mencatat, pariwisata Cirebon semakin meningkat, namun tak sebanding dengan jumlah wisatawan yang berkunjung. Bahkan menurun. Mengapa terjadi?



Tepat pukul 8 pagi, Eman Suherman sudah siap membuka gerbang wisata Cikuya. Objek wisata yang berlokasi di Desa Belawa, Kecamatan Lemahabang ini dikenal dengan suhuan kura-kura yang mempunyai ciri khusus di punggung. Kura-kura tersebut diakui sudah ada sejak ratusan tahun silam dan menjadi ikon Cirebon. Kurang lebih terdapat 300 ekor kura-kura dan ratusan tukik (anak penyu) di wisata Cikuya.

Setiap pagi dan sore, Eman memberi makan kura-kura dengan daging dan ikan. Dalam sehari, kura-kura belawa membutuhkan 10 kg daging mentah. Namun, Eman hanya menyediakan setengahnya. "Memang harusnya 10 kg, tapi kami tidak mampu.

Jadi cuman 5 kg," ujar Eman.

Untuk mengantisipasi, pengelola wisata Cikuya menyediakan singkong sebagai tambahan nutrisi. Beruntung, sebagian para pengunjung sering kali membawa makanan bila berkunjung.

Eman mengatakan, bila kondisi wisata Cikuya sudah 5 tahun silam sepi pengunjung. "Selain hari Minggu, kita bahkan sepi sekali. Terhitung jari yang datang ke sini," tuturnya.

Pendapatan dari pengunjung sejauh ini belum bisa untuk menutup biaya operasional. Jangan tanya, bagaimana kesejahteraan para pengelola. "Dalam seminggu buat kami saja kadang-kadang cuman Rp 30 ribu buat pengurus. Gak nutup dengan rasio

pengunjung," keluh Eman.

Eman mempertanyakan, kepedulian Pemerintah dan DPRD Kabupaten Cirebon terhadap kondisi wisata Cikuya yang semakin membebani pengelola. Padahal kura-kura Cikuya termasuk hewan langka dan masuk kategori dilindungi. "Tiap tahun kura-kura semakin banyak dan biaya pakan meningkat, tapi wisata semakin sepi. Kita sendiri kadang pusing. Dan kita tunggu langkah konkret Pemkab Cirebon," kata Eman.

Tak jauh halnya dengan Ekowisata Mangrove Kasih Sayang di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Sejak Januari 2020, wisata yang baru berdiri 2017 silam ini,

sudah minim pengunjung.

"Dari awal tahun sampai sekarang jumlah wisatawan per hari hanya 10 sampai 20 orang saja. Jika hari libur paling banyak sampai 30 wisatawan saja," ujar Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas Nursin Subroto. Padahal di masa kejayaannya, ekowisata ini sempat banjir pengunjung hingga 1.500 wisatawan dalam sehari.

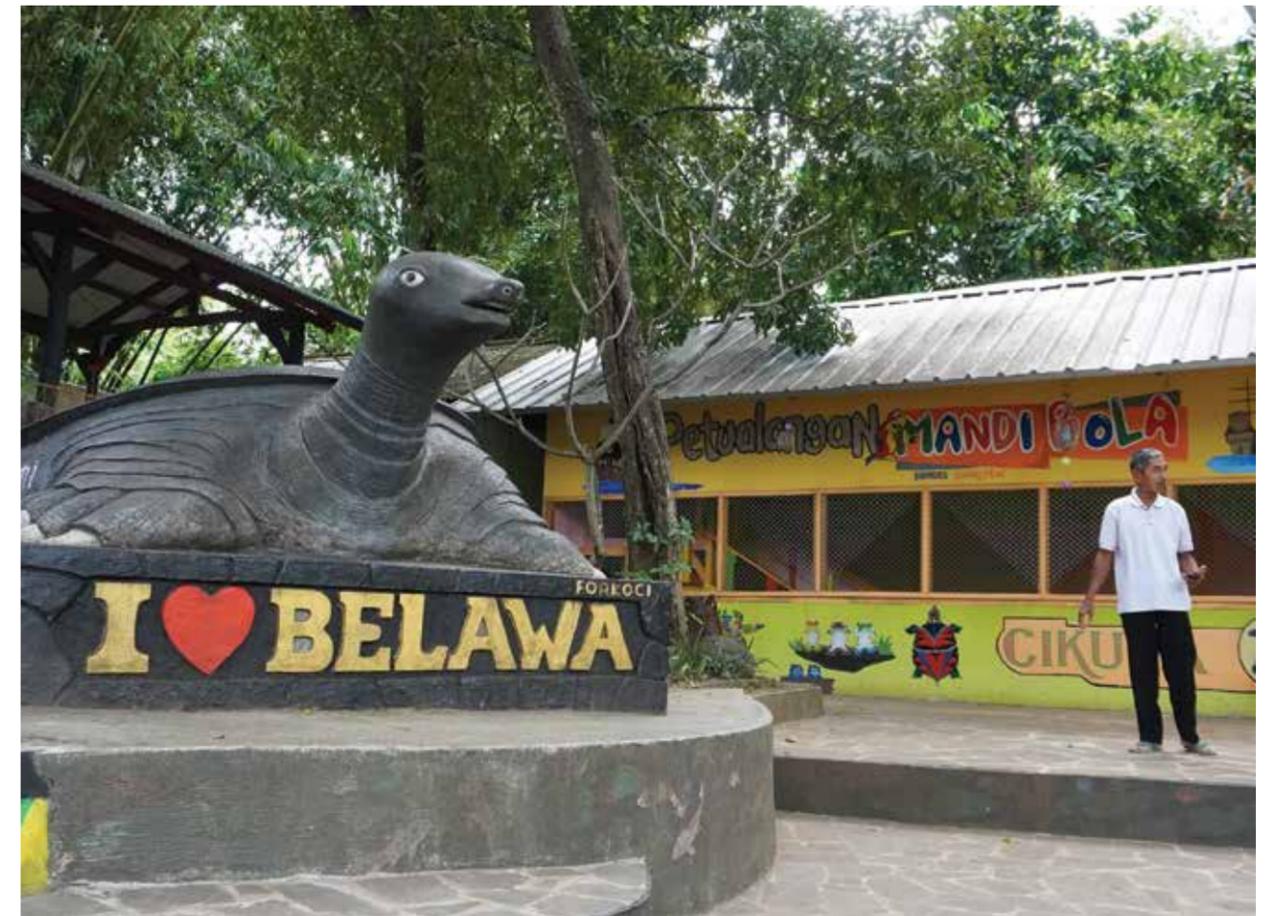
Kabid Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon Achmad Bayu Suradilaga mengakui industri kepariwisataan di Kabupaten Cirebon belum ada kenaikan dan cenderung lesu. Pariwisata Kabupaten Cire-

bon hanya mampu mengandalkan wisata religi Makam Sunan Gunung Jati.

Berdasarkan data Disbudpar Kabupaten Cirebon, ada 66 Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK). DTWK merupakan lokasi wisata yang memiliki potensi namun belum terkelola dengan baik seperti Curug Cikalahang.

"DTWK ada 66, tapi kalau wisata yang sudah berjalan dan masuk kategori kunjungan wisata ada 13, termasuk milik swasta seperti kampung sabin," ungkap Bayu.

Jumlah tersebut meliputi wisata budaya, alam dan buatan yang tersebar di berbagai desa. Di tahun 2022, ada 22 desa yang dinobatkan sebagai desa wisata melalui surat keputusan bupati.





Sementara pada 2023, sejumlah 13 desa juga tengah mengajukan SK. Meski demikian, Disbudpar berusaha selektif, agar wisata desa tak hanya memiliki SK namun memiliki standar fasilitas.

Namun, dengan bertambahnya wisata rupanya tak sebanding dengan jumlah wisatawan yang berkunjung. Ia mengungkapkan jumlah wisatawan berangsur menurun berdasarkan *year of year* (YOY).

“Berdasarkan catatan, sejak Agustus 2023 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Cirebon 524.081,” ungkap Bayu.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon juga mel-

aporkan, selama 2018 hingga 2022 jumlah wisatawan yang melancong ke Kabupaten Cirebon sejumlah 4.579.177 jiwa.

“Jika dilihat *trend* turun, dari semula jutaan sekarang cuman ratusan ribu,” terang Bayu. Ia pun berharap, menjelang akhir tahun 2023, wisatawan akan bertambah.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Drs Hj Hanifah merasa prihatin dengan kondisi pariwisata Cirebon. Ia mengatakan, kekayaan wisata Kabupaten Cirebon semestinya membuat angin segar bagi para pengelola wisata.

Namun kenyataannya jauh panggang dari api. Kenaikan wisata tak dibarengi dengan

meningkatnya para pelancong. Padahal, industri wisata merupakan salah satu sumber PAD.

“Prihatin ya, padahal destinasi wisata kita itu bagaimanapun diharapkan dapat memberikan kontribusi PAD,” katanya.

Politisi PKB itu menilai, menurunnya jumlah wisatawan disebabkan kurangnya keseriusan pemerintah terhadap pengelolaan wisata. Penyebab salah satunya, kata Hanifah, disebabkan karena akses jalan maupun fasilitas yang tidak memadai. “Kalau tempatnya tidak nyaman, jalan juga rusak tentu wisatawan enggan berkunjung. Itu salah satu faktornya,” tandasnya. •par

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

## Hanifah: Perlu Intensifkan Pembinaan dan Promosi

Agar wisata tak layuh sebelum berkembang, diperlukan dukungan manajemen, fasilitas dan promosi secara intensif.



Dari total 66 wisata yang masuk kategori Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK), hanya 13 yang dinilai masih aktif dikunjungi wisatawan. Selebihnya diakui layuh dan stagnan. Salah satu wisata yang sempat moncer dan saat ini mulai sepi adalah Mangrove Mundupesisir.

Ketua Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Desa Mundupesisir Nursin Subroto menyampaikan, bila ekowisata mangrove mengalami kelesuan pasca pandemi. Padahal di tahun awal berdiri, wisata ini sempat menjadi favorit bagi para wisatawan lokal. Mangrove Mundupesisir dibuka secara resmi 2018 silam.

Di tahun tersebut, pengelola berhasil meraup keuntungan Rp 3 juta dalam sehari, dengan jumlah

pengunjung tak kurang dari 1.500 orang. Namun berbeda jauh dengan kondisi saat ini yang mulai ditinggal wisatawan. "Kalau sekarang, sehari ada 10 pengunjung saja sudah syukur," ungkap Nursin.

Tak hanya minimnya pengunjung, para pengelola ekowisata, satu persatu menyatakan mundur karena terhimpit ekonomi. Pasalnya, upah dari wisata mangrove belum mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Nursin mengakui, di antara penyebabnya karena minimnya inovasi dan pengembangan sarana prasarana wisata. Beberapa fasilitas yang ada, diakui tak terawat dan rusak. Misalnya rute jalan masuk kawasan yang penuh berlubang, perpustakaan dan buku rusak yang dimakan rayap, hingga sampah

yang terlihat berserakan.

"Tapi itu terjadi karena memang kita minim anggaran untuk pengembangan. Itu yang kita butuhkan perlunya *support* Pemkab Cirebon," ujar Nursin.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Hanifah menilai, agar pariwisata Cirebon tak layuh sebelum berkembang, diperlukan pembinaan dan pelatihan manajemen wisata. Pengetahuan tentang pariwisata sangat penting, agar destinasi wisata lebih berkualitas dan dapat berinovasi. Sehingga wisata tersebut tidak kehilangan pengunjung.

"Pengelola wisata jangan berhenti berinovasi, misalkan sebagai daya tarik buat *event* wisata yang mengangkat keunikan dan kekhasan Cirebon," ujarnya.

Sejauh ini, politisi PKB itu berpendapat, belum semua pengelola wisata memahami cara mengelola wisata. Pentingnya pengetahuan industri wisata agar setiap tindakan pengelola dapat terukur. Pengelola harus memiliki desain fasilitas dan sarana prasarana yang menarik, agar wisatawan mau berlama-lama dan akhirnya kembali berkunjung.

"Biasanya wisata akan sepi kalau tidak nyaman, misalkan kantinnya kotor, tidak ada toko souvenir, dan sarana lain tidak ada. Karena kenyamanan itu penting," ungkap Hanifah.

Selain itu, indikator keberhasilan wisata, dilihat dari kondisi infrastruktur akses jalan. "Wisatawan baik lokal, nasional bahkan internasional enggan berkunjung ke tempat wisata kalau akses menuju tempat wisata tersebut buruk dan rusak," jelasnya.

Jika akses jalan sudah bagus, manajemen sudah jelas, dan fasilitas memadai, terakhir adalah upaya promosi secara intensif.



Promosi wisata, menjadi tolok ukur sejauh mana wisata dapat berkreasi mencari simpati publik. Di zaman digital ini, seharusnya, kata Hanifah, pengelola wisata wajib memiliki media untuk mempublikasikan dan mempromosikan wisata.

Hanifah menegaskan, pentingnya peran Disbudpar Kabupaten Cirebon untuk membina secara serius pada sektor pariwisata. Terlebih, pariwisata menjadi salah satu sektor retribusi pendapatan daerah. Selain pembinaan, tak kalah urgen bantuan penyediaan sarana prasarana bagi *start up* wisata.

"Dan itu harus diikat melalui payung hukum yang jelas baik perda dan perbup," tegasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Disbudpar Kabupaten Cirebon Achmad Bayu Suradilaga memastikan Disbudpar telah mengupayakan pembinaan.

"Beberapa kali kami lakukan pembinaan ke setiap desa dan

wisata swasta. Kalau di desa biasanya kami lakukan pembinaan pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), baik dalam pengelolaan atau pengembangan potensi desa yang belum terbangun wisata," jelas Bayu.

Meski demikian, Bayu mengakui, pembinaan tersebut baru dilakukan di beberapa desa saja.

Bayu menerangkan, saat ini Disbudpar telah mengajukan perubahan peraturan daerah mengenai rencana induk pembangunan pariwisata daerah (Ripparda). Hal itu bertujuan agar pengembangan kualitas wisata di Kabupaten Cirebon lebih efektif dan efisien. Kehadiran Ripparda diharapkan akan menjadi solusi atas kondisi wisata saat ini.

"Melalui Ripparda kita akan menguatkan wisata kita, agar semakin meningkat sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata, yang menjelaskan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan." terangnya. •par

## Ripparda

# Semua Kawasan Pariwisata Bakal Terkoneksi

Melalui Perda tentang Ripparda, Disbudpar mencanangkan pariwisata Cirebon saling terkoneksi antar kawasan. Seperti apa?



Disbudpar Kabupaten Cirebon telah menyiapkan solusi atas menurunnya jumlah wisatawan di Kabupaten Cirebon melalui perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda).

Disbudpar mengklaim, Ripparda akan meningkatkan kualitas wisata sehingga berjalan lebih efektif dan efisien.

"Jika mengacu pada Ripparda tahun 2022, ada 9 Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK). Setelah pengajuan kembali KSPK berubah dan diuraikan melalui 14 strategi," ungkap Achmad Bayu Suradilaga, Kabid Promosi dan Ekonomi Kreatif Pariwisata Disbudpar Kabupaten Cirebon.

Melalui Ripparda, kata Bayu, seluruh pariwisata semakin ditegaskan sebagai lumbung wisatawan. Antara lain; pengembangan makam Sunan Gunung Jati sebagai pusat wisata religi dan disiapkan akan mampu

membuka jalan poros wisata belanja kawasan Trusmi.

Jalan Soekarno-Hatta direncanakan menjadi kawasan kuliner dan kawasan taman sepeda; Jalan Tuparev sebagai kawasan industri pariwisata dan kuliner. Indikasi programnya pengembangan fasilitas jalan raya (*street furniture*), dan rest area (*banches*, peneduh).

Selanjutnya, Disbudpar memastikan penataan kawasan Trusmi dan Tengahtani sebagai pusat batik Cirebon.

Tak ketinggalan penataan perpustakaan daerah dan Museum Cakrabuana sebagai kawasan wisata edukasi sejarah; pengembangan Plangon dan Kebon Balong Sumber sebagai kawasan kuliner perkotaan dan budaya sumber; kawasan Batik Ciwaringin sebagai sentra kerajinan,

Dalam Ripparda dipilih sebagai kawasan wisata alam di wilayah Beber, Setu Patok, Greged dan Sedong; kawasan wisata pantai di Bungko, Gunung-



jati, Mundu, Pangenan, Gebang Dan Losari. Berikutnya pengembangan kawasan Banyu Panas Palimanan, Gua Macan dan Batu Lawang.

Sementara khusus wisata jenis permainan terdapat di Ciperna sebagai golf arena dan disiapkan untuk *event* olahraga tingkat provinsi dan nasional; wisata seni dan budaya di Kecamatan Gege-sik; pengembangan kota tua di Jamblang sebagai *heritage* Kabupaten Cirebon. Terakhir, pengembangan desa wisata sebagai daya tarik pariwisata lokal.

Bayu menjelaskan, melalui Ripparda antar kawasan strategis dan 66 wisata akan terkoneksi sehingga menjadi rute bagi wisatawan. "Jadi antar kawasan wisata itu bisa terkoneksi. Agar tidak hanya ramai di satu tempat sementara yang lain sepi," jelas Bayu.

Seperti diketahui, Perda tentang Ripparda sebenarnya telah disahkan pada 2022 silam,

namun di tahun 2023 Disbudpar kembali mengajukan revisi. Bayu menilai, Ripparda belum sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (Ripparnas).

"Sudah dibahas cuma belum disahkan. Jika berdasarkan Ripparnas, Ripparda itu kan dimensi waktunya sampai 15 tahun baru diganti. Cuman, Ripparda lama yang kemarin disahkan hanya sampai tahun 2027, berarti hanya 5 tahun," jelasnya.

Setelah Ripparda disepakati dan disahkan, desain pembangunan pariwisata Cirebon akan tertuang ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon. Barulah akan dikonsolidasikan dengan SKPD. Misalnya, mengenai strategi Desa Wisata, maka dikaji bersama DPMD.

Bayu berharap, kehadiran Ripparda akan meningkatkan kawasan pariwisata lebih teratur

dan tertata. Dan pada akhirnya dapat meningkatkan jumlah wisatawan di seluruh kawasan pariwisata.

"Nanti kalo Ripparda sudah disahkan, pembangunan pada sektor wisata juga akan lebih terarah setiap tahunnya," tandas Bayu.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon Dr Hj Hanifah menyampaikan pembahasan Ripparda sempat mengalami kendala karena sebagian materi berbenturan dengan Perda RTRW. Sehingga perlu penyesuaian. Politisi PKB itu juga menilai, sejumlah destinasi wisata desa yang telah di SK bupati mesti ditinjau ulang.

"Karena bicara wisata juga harus melihat bagaimana RTRW. Jangan sampai tidak sesuai dan malah berbenturan," ujarnya.

Meski demikian, Hanifah menjelaskan, pembahasan Ripparda telah mencapai tahap *finishing* dan dipastikan segera disahkan. Dan dalam waktu dekat, akan masuk dalam RPJMD Kabupaten Cirebon. "Pembahasannya sudah selesai, jika Perda RTRW selesai, maka otomatis Ripparda juga selesai. Apalagi kewajiban itu memang terkandung ke dalam RPJMD, jadi harus segera diselesaikan," jelasnya.

Perempuan yang sempat berkarir di dunia pendidikan itu berharap, kehadiran Ripparda akan menjawab keresahan para pengelola wisata baik lokal maupun swasta, sehingga bisa meningkatkan jumlah pengunjung.

"Harapan kami dari DPRD semoga dengan adanya Perda Ripparda ini bisa membuat tata ruang destinasi wisata sesuai dengan RTRW yang sudah ditentukan. Dengan begitu akan memberi kenyamanan pada pengunjung sehingga jumlah pengunjungpun meningkat kembali," katanya •par

## Belajar dari Kabupaten Gresik Berkat Perda, Pelancong Meningkatkan 2 Kali Lipat

Setelah kehadiran Perda Ripparda, Pemkab Gresik berhasil meningkatkan jumlah wisatawan. Bahkan, 2 kali lipat. Wow, bagaimana bisa?



Kabupaten Gresik, dikenal sebagai kota santri. Aktifitas keagamaan di daerah tersebut masih sangat kental. Hal itu juga dibuktikan dengan keberadaan sejumlah wisata religi yang berlimpah. Objek wisata religi yang populer bagi kalangan umat muslim Indonesia misalnya makam Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Giri, dan Jujuk Tempo.

Meski demikian, Kabupaten Gresik juga memiliki sejumlah objek wisata alam, sejarah, bahari, dan kuliner.

Pemerintah Kabupaten Gresik dinilai berhasil mengelola sektor pariwisata. Hal itu dibuktikan melalui meningkatnya wisatawan yang berkunjung setiap tahun.

Dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Gresik, jumlah pelancong pariwisata kian meningkat sejak tahun 2020 yang mencapai 2,103,355 dan 2,106,170 jiwa pada 2021.

Di tahun berikutnya, kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara bahkan 2 kali lipat mening-

kat sebanyak 4,133,282 jiwa. Terbagi 4,120,683 pelancong domestik dan 12,599 wisatawan mancanegara.

Hal itu disebabkan, Pemerintah Kabupaten Gresik berhasil mengoptimalkan seluruh potensi kawasan pariwisata dengan melakukan penataan dan perawatan.

"Itu yang kita tahu kenapa di sana berhasil meningkatkan wisatawan. Dan hampir seluruh kawasan wisata terjamah," ungkap Ketua Pansus III DPRD Kabupaten Cirebon Hanifah.

Hanifah mengatakan, pada 2022 silam, Pansus III DPRD Kabupaten Cirebon yang bertugas mengkaji pariwisata sempat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gresik. Menurutnya banyak pelajaran dan informasi yang dapat menginspirasi bagi Kabupaten Cirebon.

Diakui, Kabupaten Gresik memiliki beberapa kesamaan dengan Kabupaten Cirebon. Salah satunya mengenai keberadaan destinasi wisata religi.

"Di Gresik ada *makbaroh* Syekh Maulana Malik



Ibrahim, dan Sunan Giri. Di kita juga ada *makbaroh* Syekh Syarif Hidayatullah, dan Syekh Maulana Dzatul Kahfi. Artinya kita memiliki potensi yang sama," kata Hanifah.

Selain potensi wisata religi, potensi wisata lain seperti wisata sejarah, bahari, dan alam. Bahkan Gresik dan Cirebon memiliki julukan yang sama yaitu Kota Wali. Hal itulah yang mendorong Hanifah bersama Pansus III memilih berkunjung ke Kabupaten Gresik.

Hanifah mengungkapkan, kunjungan tersebut dalam rangka penyempurnaan konsep Ripparda. Mengingat Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah yang sudah memiliki Ripparda dan berhasil mengembangkan potensi wisata daerah, hingga berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan.

Keberhasilan tersebut, kata Hanifah, karena peran pemerintah daerah yang sangat memperhatikan fasilitas umum dan mampu memberdayakan masyarakat setempat.

"Akses jalan sekitar wisata bagus, tidak berlubang. Lalu transportasi tradisional seperti delman juga masih ada di sana. Dan kita melihat pemerintah terlihat sangat memperdayakan masyarakat setempat," ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Gresik juga menuntut pengelola wisata wajib merawat fasilitas, sehingga pengunjung merasa nyaman. Sementara sebagai daya tarik, pemerintah daerah menyediakan cinderamata sebagai identitas.

"Lalu kantin juga banyak dan bersih, sehingga pengunjung merasa nyaman. Tak lupa masyarakat setempat juga ada

beberapa yang jual cinderamata. Hal ini bisa mengangkat perekonomian masyarakat sekitar," tambahnya.

Lebih lanjut, Hanifah menuturkan di setiap wisata terdapat pemandu *tour guide* yang akan mengantar wisatawan ke sejumlah tempat. Jika di wisata religi, mereka bertugas menjelaskan riwayat kehidupan tokoh sekaligus memimpin ritual keagamaan.

Oleh karenanya, Hanifah menilai hal tersebut perlu diikuti Pemerintah Kabupaten Cirebon. Keberadaan Peraturan Daerah tentang Ripparda yang telah disahkan benar-benar mereka realisasikan. Sehingga perkembangan wisata bisa terukur dan terarah.

Hanifah berharap, dengan potensi yang ada, sudah saatnya Pemkab Cirebon mulai serius mengelola wisata lokal. Terlebih, dengan diresmikannya Tol Cisumdawu yang semakin memberikan peluang kehadiran wisatawan.

"Akses jalan Tol Cikampek – Palimanan, Palimanan – Cisumdawu itu sangat mendukung aksesibilitas pengunjung untuk berwisata di Kabupaten Cirebon," ungkap Hanifah.

Jika wisata ramai pengunjung, masyarakat setempat tentu akan merasakan hal positifnya. Perda Ripparda, bukan hanya akan menjawab konflik dalam sektor pariwisata saja, melainkan menjadi solusi yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat.

"Seperti di Gresik, dengan adanya Ripparda semoga akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Adanya wisata yang berkembang, maka akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Baik sebagai pemandu wisata atau usaha kuliner khas Cirebon. Dan tentu PAD Kabupaten Cirebon akan meningkat," tandasnya. •Par

## Sambut Baik Edukasi Politik untuk Pelajar

Ratusan siswa yang berasal dari SMAN 1 Palimanan berkunjung ke gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Selain para siswa, hadir pula sejumlah guru ke kantor wakil rakyat tersebut. Kehadiran mereka selain untuk menyampaikan aspirasi juga dalam rangka penguatan studi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang merupakan pembelajaran kurikulum merdeka.

“Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bagi para siswa dalam mempraktikkan demokrasi. Dan praktiknya kita lakukan dalam pemilihan OSIS misal-

nya,” ujar Koordinator Guru Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) SMAN 1 Palimanan Ervina.

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon H Mustofa pun menyambut baik. Jimus sapaanya, mengatakan, kunjungan civitas SMAN 1 Palimanan juga merupakan upaya edukasi politik kepada generasi muda. Ia pun tak sungkan memperkenalkan lembaga politik yang ada di Kabupaten Cirebon.

Tampak hadir pula Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Teguh Rusiana Merdeka beserta anggota DPRD Kabupaten Cirebon lainnya.



## Aksi Tanam Ribuan Bibit Pohon

Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi, mengikuti kegiatan penanaman pohon secara serentak di Desa Kerandon, Kecamatan Talun, yang diselenggarakan Polresta Cirebon dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kegiatan tersebut bertajuk “Polri Lestari Negeri, Penghijauan Sejak Dini.”

Pada kesempatan itu, Luthfi menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan penanaman pohon tersebut. Kegiatan ini, kata Luthfi, menjadi aksi nyata dalam menjaga lingkungan, sekaligus sinergi antara legislatif dan Polri dalam menciptakan lingkungan sehat.

ngan sehat.

Politisi PKB itu berharap, kegiatan tersebut, dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, khususnya dalam peningkatan kesehatan dan lingkungan.

Sementara itu, Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman mengatakan, sebanyak 7.927 pohon ragam jenis ditanam serentak di 33 titik lokasi di wilayah Kabupaten Cirebon. Dia menjelaskan, aksi penanaman pohon tersebut diharapkan bisa meminimalisasi polusi udara dan mendorong terciptanya lingkungan hijau.



## Deklarasi Damai Pemilu 2024

Dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi menghadiri acara deklarasi damai Pemilu di aula pesat gatra Mapolresta Cirebon. Turut hadir pula Forkopimda Kabupaten Cirebon, KPU, Bawaslu, dan 18 partai politik.

Deklarasi tersebut dilaksanakan dengan pembacaan deklarasi pemilu damai, yang dipimpin ketua KPU dan diikuti seluruh tamu undangan serta penandatanganan pernyataan pemilu damai oleh Forkomp-

inda, pelaksana, pengawas, dan peserta Pemilu 2024.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, mengatakan, deklarasi pemilu damai tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana sejuk dan kondusif menjelang, saat dan pasca Pemilu 2024, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon.

"Kami juga mengajak seluruh pendukung parpol dan calon legislatif dapat melakukan pesta demokrasi secara profesional, proporsional dan taat hukum serta mementingkan kepentingan masyarakat luas," ujarnya.



## Terima Kunjurer DPRD Kota Mojokerto

DPRD Kabupaten Cirebon menerima kunjungan kerja DPRD Kota Mojokerto. Rombongan tersebut diterima Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon, Dra Puti Amanah Sari. Pertemuan yang berlangsung di ruang Abhimata gedung DPRD Kabupaten Cirebon tersebut membahas program peningkatan dan pemberdayaan UMKM.

Menurut Puti, peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki urgensi karena

kontribusinya terhadap ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. UMKM juga mendukung diversifikasi ekonomi dan inovasi di tingkat lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Alhamdulillah hari ini saya dapat menerima kunjungan kerja sejumlah perwakilan dari DPRD Kota Mojokerto. Kami saling *sharing* dan membahas tentang program UMKM, mudah-mudahan dapat membawa manfaat," ujar Puti.



## Krisis Air Warga Pesisir



Assalamualaikum wr wb.

Yang terhormat bapak/ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Saya Wawan (29) asal Desa Mundu Pesisir. Saya ingin mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih di wilayah desa kami terutama saat kemarau tiba. Banyak warga kesulitan mendapatkan air dan tak jarang kami harus antri untuk mengambil air di sumur milik pemerintah desa akibat sulitnya mendapatkan air bersih.

Ditambah lagi, Kondisi air sumur semakin lama semakin menyusut. Krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat Desa Mundu Pesisir ini sudah bertahun-tahun dirasakan, namun hingga hari ini tak kunjung ada solusi.

Kami berharap DPRD Kabupaten Cirebon, maupun Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat melihat serta memberikan perhatian, agar setiap musim kemarau tiba, masyarakat tidak selalu dihantui kekeringan dan krisis air bersih, terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Wawan/Mahasiswa/Mundu Pesisir)

## Awasi Daftar Nama Caleg

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, daftar nama calon legislatif (caleg) yang terdaftar dalam DCS sebagian merupakan kuwu di Kabupaten Cirebon. Secara regulasi, para kuwu tersebut wajib menyertakan surat pengunduran diri sebagai kuwu, beserta tanda bukti surat tanda terima pengunduran diri dari instansi berwenang.

Akan tetapi, jika kita telaah nama yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu, ada sejumlah nama calon yang diketahui belum menyatakan pengunduran diri sebagai kuwu. Hal tersebut tentu bertabrakan dengan regulasi pencalonan. Karenanya, KPU sebagai penyelenggara Pemilu harus bisa memastikan para calon tersebut bersih dari jabatan yang sedang diemban.

(Sandi/Aktivis/Cipejuh)



## Mohon Perbaiki Jalan Lubang Besar



Assalamualaikum wr wb.

Sepekan lalu di akhir Juli 2023, seorang remaja tersungkur dari sepeda motor saat melewati sebuah lubang dengan kedalaman lebih dari 50 cm di Jalan Raya Kalimeang. Lubang tersebut rupanya sebuah celah yang berasal dari ambruknya konstruksi penyambung jembatan di jalan tersebut. Lambannya respon dinas dalam penanganan pasca insiden, berpotensi menambah daftar panjang korban.

Sebelumnya, lubang yang berada di jalan raya tersebut sudah pernah diperbaiki. Namun karena kurangnya perhitungan teknis, akhirnya kembali rusak. Saya kira, dibutuhkan konstruksi dan material yang lebih solid. Karena jika dilihat, terdapat gap antar beton penyangga yang memungkinkan munculnya lubang seiring waktu. Saya harap bapak/ibu dewan dapat menindaklanjuti masalah ini.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Rani/Karyawan/Kalimeang)

## Gundukan Aspal Ancam Keselamatan

Assalamualaikum wr wb.

Salam hormat bapak/ibu anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Saya Vito (21) asal Desa Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Saya ingin melaporkan kerusakan jalan Pantura tepatnya di Jalan Raya Playangan No 66. Di lokasi tersebut, terdapat gundukan aspal setinggi kurang lebih 15-25 cm dengan panjang 4 meter. Gundukan yang berada tepat di tengah badan jalan tersebut jelas mengancam keselamatan pengguna jalan, terutama pengguna roda dua.

Ditambah lagi, kecepatan kendaraan yang melintas di lokasi tersebut rata-rata mencapai 80-90 km/jam. Maka perlu kiranya, agar kerusakan tersebut segera diperbaiki. Meski sejauh ini, belum terdengar kabar mengenai jatuhnya korban akibat kerusakan tersebut. Tapi akan lebih baik jika dilakukan upaya pencegahan sebelum timbul korban. Saya harap laporan ini dapat segera ditindaklanjuti.

Wassalamu'alaikum wr wb.

(Vito/Buruh/Gebang)



## Siwang Ma'ipeh Dulu Reseller, Sekarang Bos Retail

Semula Ma'rifah hanyalah reseller produk siwang hingga sukses di pasar retail. Bagaimana perjalanan pemilik Siwang Ma'ipeh



Tak banyak tahu, jika Cirebon memiliki jajanan khas daerah bernama Siwang. Siwang atau terasi bawang merupakan campuran antara terasi dan bawang merah yang disangrai sehingga memiliki aroma terasi yang kuat.

Ada banyak para pelaku UMKM yang memproduksi Siwang. Namun sedikit yang mampu *survive* di ruang pasar. Di antara yang mampu bersaing dan mengisi toko oleh-oleh Cirebon dan retail modern yakni Siwang Ma'ipeh. Pemiliknya adalah Ma'rifah, warga Desa Keraton, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon.

Sebelum berhasil mencapai puncak ini, Ma'rifah mempunyai kisah tersendiri. Semula ia hanyalah *reseller* Siwang milik saudaranya. Namun itu tak

berlangsung lama. Suatu hari, saudara Ma'rifah tak lagi memproduksi Siwang, sementara permintaan pelanggan tetap berdatangan.

Berbekal pengalamannya menjadi reseller, Ma'rifah memberanikan diri membuat Siwang, produksinya dengan modal seadanya.

"Setelah 6 bulan jadi reseller, tahun 2017 saya mencoba produksi sendiri karena saudara saya punya anak kecil jadi tidak bisa fokus membuat Siwang," jelas Ma'rifah.

Saat itu, Ma'rifah mengawali usahanya dengan membeli sekilo bawang dan terasi guna memenuhi para pelanggannya.

Tak ada nama brand, legalitas, bahkan kemasan. Ma'rifah bahkan hanya memakai plastik biasa untuk



wadah siwang.

Seiring waktu, peminat Siwang buatan Ma'rifah ternyata semakin bertambah. Tahun 2018, Ma'rifah pun mulai serius mengembangkan usahanya dengan mengurus sertifikat perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) beserta memilih nama *brand*.

"Waktu itu ikut acara Disperindag, jadi tidak dipungut biaya. Dan akhirnya saya memutuskan memilih nama brand Siwang Ma'ipeh," ujarnya.

Di tahun berikutnya, Ma'rifah juga mengurus sertifikasi halal

dan rutin mengikuti program yang diadakan Disperindag. Salah satunya program Comprehensive Industry Coaching (CIC) Disperindag. Ia pun belajar banyak tentang usaha, seperti *marketing*, *branding*, dan jaringan promosi.

Berkat ketekunannya mengembangkan usaha, saat ini Siwang Ma'ipeh mulai banyak dikenal. Dalam sebulan, Ma'rifah mampu memproduksi 450 kilo Siwang.

"Sekarang 2 hari goreng 30 kilo. Bawangnya juga pakai

bawang Brebes, kata pelanggan saya sih baunya lebih wangi," kata Ma'rifah.

Siwang Ma'ipeh memiliki 2 ukuran kemasan. Ukuran 100 gram yang dijual dengan harga Rp 27 ribu dan ukuran 65 gram yang dibandrol Rp 20 ribu. Harga tersebut bisa berubah bagi reseller. Sementara ada 3 varian yaitu, original, pedas, ekstra pedas, dan mix all varian.

Siwang Ma'ipeh dapat ditemukan ditoko oleh-oleh Cirebon, Kuningan dan Bandung. Ma'rifah juga menjualnya di marketplace seperti, Shopee, Lazada, Tokopedia, Dan Blibli. Selain itu, Ma'rifah juga punya banyak reseller dari Jawa dan luar Jawa.

"Ada di Asia Toserba, Surya Toserba, dan toko oleh-oleh sekitar Kuningan, Bandung. Saya juga punya reseller dari Tasikmalaya, Cikampek, Sumedang sampai Kalimantan," ungkapnya.

Tak hanya itu, Siwang Ma'ipeh juga sudah bertandang ke negara Asia yang dibawa para TKI Cirebon di Taiwan dan Jepang. Meski demikian, Ma'rifah belum berniat mengekspor Siwang Ma'ipeh ke luar negeri.

"Dulu pernah ditawarkan untuk ekspor, tapi banyak prosedurnya. Saya pusing jadi saya tahan dulu. Belum lagi minimal expired 1 tahun, sementara Siwang saya hanya 6 bulan," jelasnya.

Saat ini, Ma'rifah memiliki 10 pegawai yang membantunya mengupas sekaligus memotong bawang. Sementara untuk produksi dia ditemani 1 saudaranya. Siwang Ma'ipeh telah tersedia dalam bentuk botol, toples, dan pouch.

"Sekarang mudah diiburu di Surya Cirebon, Jatibarang, Kuningan, Asia dan beberapa supermarket lainnya," pungkasnya. •Par

## Angkutan Umum Meski Terjal, Tetap Mengaspal

Di bawah terik matahari, di samping lampu merah, Herman (41) tengah duduk menghitung hasil. Sejenak berhenti. Lantang suaranya terdengar memanggil pejalan kaki agar menaiki angkutannya. Sudah beberapa tahun, Herman menjadi supir angkutan umum jurusan Plered-Sumber.

Ia bercerita, bila setiap tahun jumlah penumpang angkutan semakin menurun. "Sebelum transportasi *online* merebak, kami sempat menjadi primadona masyarakat berpergian, namun sekarang sudah jauh berbeda," ungkap Herman.

Tak dapat dipungkiri, kemajuan teknologi sedikit banyak, telah menggeser angkutan umum di jalanan. Pendapatan mereka pun menurun drastis. Herman tak punya banyak pilihan selain bertahan, alih-alih beradaptasi mengikuti arus perubahan.

"Iya cuman ini kerjaan saya sejak muda, walaupun sehari kadang kalau sepi cuman dapat Rp 35-50 ribu, saya bersyukur," katanya \*Mir



## Hj Rukyati S Pd Dijuluki Kepala Sekolah Pembangunan

Tak ada sekolah yang disinggahi Rukyati selain menorehkan prestasi. Rukyati dikenal karena kepiawaiannya melahirkan program inovasi. Bagaimana kisahnya?



**B**aru seumur jagung, Rukyati diamanahi kepala sekolah SMP Negeri 1 Weru, Kabupaten Cirebon. Meski demikian, perubahan secara signifikan tampak terjadi di lingkungan pendidikan. “Baru sebulan setengah saya menjabat di sini,” ungkapnya

Dalam kurun sebulan, Rukyati sudah menginisiasi pembangunan perpustakaan dan ruang resepsionis.

“Di sini sudah mulai berbenah, membuat ruang perpustakaan sekolah terbagus di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Selain infrastruktur sekolah, Rukyati juga membangun karakter warga sekolah yang islami dan hobi baca melalui program “Jumpa Bukur White Kopi.”

Jumpa Bukur White Kopi tersebut adalah akronim Jum’at Pagi Buka Alquran, dan Salawat Koleksi Pindah.

Dengan membaca alquran dan salawat, diharapkan dapat membangun karakter islami, dan memiliki budi pekerti luhur.

Sementara untuk meningkatkan hobi baca, Rukyati menugaskan para siswa membaca buku selama seminggu dan diharuskan untuk mereviewnya.

“Setelah membaca salawat, anak yang sudah selesai membaca untuk maju menghadap mentornya dan mereview bukunya. Kalau sudah, buku tersebut dipindahkan ke temannya secara estafet sampai buku itu balik lagi ke tempat awalnya,” kata Rukyati.

Berkat inisiasi program tersebut, Rukyati mendapat julukan kepala sekolah pembangunan dari jajaran guru dan siswa SMP N 1 Weru.

Sebelum menjabat Kepala Sekolah SMP N 1 Weru, Rukyati mengawali karirnya sebagai guru di SMP N 2 Arjawinangun (seka-



rang SMP N 1 Panguragan) pada 1988 hingga 1994.

“Di tahun 1994 sampai 2016 saya jadi guru di SMP N 1 Weru,” tuturnya.

Barulah di tahun 2016, Rukyati pertama kali diamanahi untuk memimpin Sekolah Satu Atap Karangsembung selama satu semester. “Kemudian dipindahkan lagi menjadi Kepala Sekolah di SMP N 1 Pangenan,” ujar perempuan kelahiran 1967 tersebut.

Rukyati mengaku, setiap sekolah yang ia duduki tak pernah absen masuk kategori 5 besar Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat Kabupaten Cirebon.

Saat memimpin SMP N 1 Pangenan misalnya, Rukyati berhasil membawa peringkat ke 4 OSN tingkat kabupaten.

“Saya seperti mimpi, meski sekolah pinggir tapi berhasil masuk nominasi,” terangnya.

Di tahun 2019, Rukyati dipindah tugaskan ke SMP N 2 Sumber dan berhasil meraih sekolah Adiwiyata. Selang dua tahun, ia pun diamanahi untuk memimpin SMP N 2 Plumbon dan menorehkan juara 1 OSN untuk mapel IPA.

“Saya tidak menyangka bisa juara 1 OSN tingkat Kabupaten Cirebon,” kata Rukyati.

Rukyati mengaku, semua pres-

tasi yang didapat di setiap sekolah yang dipimpinnya karena kemampuan mengorganisasi kerja tim.

“Bukan karena saya sendiri, tentu semua itu kerja tim yang melalui manajemen, sehingga dapat membuat siswa berhasil mendapat juara OSN tersebut,” ungkapnya.

Bagi Rukyati, sisa jabatan menjadi kepala sekolah, ia manfaatkan untuk menuai ragam prestasi pendidikan “Dua tahun lagi saya juga akan pensiun. Makanya sisa waktu ini saya manfaatkan betul untuk membangun karakter siswa dan kontribusi nyata bagi pendidikan,” tandasnya. •Din

## Didin Jaenudin, MM Piawai Ciptakan Suasana Belajar Nyaman

Karena kepiawaiannya memimpin sekolah, ragam prestasi sekolah ditorehkan.  
Bagaimana perjalanan sosok kepala sekolah ini?



**H**umoris, energik nan berprestasi. Itulah sekilas kesan yang menggambarkan sosok satu ini. Pembawaannya yang tenang tanda banyaknya pengalaman.

Adalah Didin Jaenudin, yang saat ini menjabat kepala sekolah SMP Negeri 1 Sumber. Didin mengawali karirnya sebagai guru pendidikan jasmani dan olahraga (PJOK) di SMP Negeri 1 Lemahabang pada 1994 hingga tahun 2006. Didin dikenal seorang guru yang bisa membuat suasana kelas terasa menyenangkan.

Di tahun 2006, Didin dipindah tugaskan ke SMP N 2 Susukan Lebak dan sempat menjabat wakil kepala sekolah. “Dan ini menjadi titik awal saya dipromosikan menjadi kepala sekolah,” ujarnya.

Benar saja selepas empat tahun, Didin untuk pertama kalinya diamanahi menjadi kepala sekolah SMP N Satu Atap Losari. Baru 7 bulan berselang, Didin dipercaya untuk memimpin SMP N 1 Greged. Baru di tahun 2012 ia kembali ke SMP N 2 Susukan Lebak. “Bedanya saat itu saya datang kembali sebagai kepek,” ungkapnya menceritakan.

Empat tahun berikutnya, giliran SMP N 1 Lemahabang yang menjadi tempat perlabuhan Didin memantapkan kepemimpinannya. Kurang lebih 6 tahun Didin menduduki jabatan kepala sekolah. Selama itu pula, berbagai pembangunan sarana sekolah SMP N 1 Lemahabang digencarkan. Antara lain, Didin berhasil membangun musala 2 lantai, ruang kelas 2 lantai, dan ruang diskusi siswa.



“Karena siswa banyak dan bangunan tidak dapat menampung sehingga menghambat kegiatan belajar mengajar. Makanya kita inisiasi penambahan ruang kelas lagi. Kenapa saya pilih dua lantai, karena luas wilayah yang kurang memadai,” jelasnya. Bagi Didin, fasilitas yang memadai akan menciptakan kegiatan belajar yang nyaman.

Selain pembangunan infrastruktur, beragam prestasi pun ditorehkan. Salah satunya penghargaan juara 2 sekolah sehat tingkat provinsi.

Selesai dari situ, Didin diamanahi menjadi kepala sekolah

SMP N 1 Sumber hingga sekarang. Selama memimpin sekolah tersebut, Didin telah membuat banyak perubahan bagi kemajuan sekolah. Baginya, kenyamanan menjadi hal terpenting untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar menjadi efektif.

“Ketika fasilitas lengkap, rapih, bersih, tentu dengan sendirinya akan membuat warga sekolah nyaman. Dan itu yang saya lakukan,” katanya.

Di SMP N 1 Sumber, berdiri megah panggung teater untuk menunjang ekstrakurikuler. Didin begitu amat peduli terhadap

tumbuh kembang siswa melalui kreativitas. Terlebih terdapat 23 ekstrakurikuler yang saat ini aktif. Dalam waktu dekat, Didin juga berencana membuat lapangan futsal.

“Karena kita punya banyak organisasi ekstra. Jadi perlu penambahan lapangan pagi, lahan masih ada, masih luas juga,” jelas Didin.

Tak lupa pembangunan karakter melalui pembiasaan juga dilakukan agar siswa disiplin, ramah, sopan, dan kritis. Upaya tersebut antara lain dengan meluangkan waktu 10 menit membaca Al-Qur’an sebelum dimulai jam pelajaran. Selain itu, terdapat kegiatan wajib membaca setiap Selasa dan kerohanian pada hari Jumat.

Namun dalam membangun karakter siswa, Didin lebih mengutamakan pembinaan pada guru-guru.

“Jadi setiap pagi, guru menyambut para siswa ketika siswa masuk sekolah. Upaya tersebut agar siswa nyaman,” kata pria kelahiran Sindanglaut 1965 itu.

Berkat upaya tersebut, salah satu siswa SMP N 1 Sumber berhasil meraih juara 1 lomba kaligrafi tingkat provinsi pada tahun 2023 dan akan mengikuti kejuaraan tingkat nasional tahun 2024.

Kepiawaiannya memimpin lembaga pendidikan, menghantarkan Didin juga dipercaya menjadi ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) periode 2018 hingga 2024.

Ia juga aktif dalam kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon sebagai wakil ketua bidang prestasi (Binpres) masa jabatan 2018-2023.

“Saya tidak pernah menjadi atlet, tapi saya yang membina atlet. Saya pernah menjabat wakil ketua binpres,” pungkas pria yang hobi bermusik tersebut. •Din

# Siapkan Hibah Atasi Kelangkaan Blangko e-KTP

Keluhan lambatnya pembuatan e-KTP menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Cirebon. Apa langkah Komisi I?



**W**arga Desa Wangkelang, Fadli Rahman (19), kesekian kalinya patah arang setiap datang ke kantor Kecamatan Lemahabang. Ia mengeluhkan alat perekaman e-KTP yang sudah berbulan-bulan tidak bisa difungsikan. Sehingga e-KTP miliknya hingga kini belum jadi.

Meski sempat diganti pada tahun lalu, namun perekaman e-KTP diakui kembali rusak. "Mohon ini harus jadi perhatian serius, saya sudah berbulan-bulan membuat e-KTP tidak jadi-jadi," keluhnya.

Ia pun berharap agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cirebon segera menindaklanjuti masalah tersebut. Terlebih dalam waktu dekat, akan ada pesta demokrasi yang mengharuskan memiliki e-KTP untuk memperoleh hak suara.

Tak jauh beda dirasakan Wahyu Wibisono (24).

Sejak Februari 2023 lalu, Wahyu kehilangan e-KTP setelah dompet miliknya jatuh. Ia pun sudah mengajukan cetak ulang di kantor kecamatan hingga beberapa kali mendatangi Disdukcapil Kabupaten Cirebon. Namun hingga kini, e-KTP tak kunjung juga didapatkan.

"Sudah lama, alasannya blangko kosong terus. Jadi sampai sekarang saya belum bisa buat rekungan karena gak ada KTP," ujar dia.

Keluhan masyarakat mengenai lambatnya pembuatan e-KTP di Kabupaten Cirebon pun sudah berkali-kali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Cirebon.

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon pun banjir keluhan dari masyarakat, terkait sulitnya membuat e-KTP. Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Yayat Hidayat mengakui, banyak keluhan mas-



arakat mengenai lambannya pembuatan e-KTP.

"Masyarakat mengeluh, merasa kesulitan dalam proses pembuatan e-KTP. Buatnya lama. Datangnya ya ke kita. Sebagai wakil dari mereka di legislatif," ungkap Yayat.

Saat masyarakat membuat e-KTP, dibutuhkan waktu lama hingga berbulan-bulan. Alasannya bermacam-macam: blangko kosong atau ketidaksinkronan data penduduk. Tentu, hal tersebut membuat masyarakat semakin kesulitan.

"Sekarang segala kebutuhan

hampir semuanya membutuhkan e-KTP. Jadi kalau buat e-KTP lama itu menyulitkan keperluan lain," kata dia.

Bahkan ada warga yang mengeluhkan tidak bisa membuat BPJS Kesehatan karena NIK tidak terdaftar. Keadaan tersebut tidak boleh dibiarkan. Harus diurai langsung dan dicarikan solusi terbaik.

"Sudah rutin kami melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah untuk mengetahui pelayanan administrasi masyarakat. Kita cek langsung di lapangan soal pelayanan ke masyarakat. Sampaikan kendala

yang dihadapi selama pembuatan e-KTP," tuturnya.

Sebagai legislator, Yayat mengetahui betul persoalan yang tengah dialami Disdukcapil. Politisi Golkar itu mengungkapkan, bila jatah blangko e-KTP dari Kemendagri untuk Kabupaten Cirebon sangat minim. Sehingga kerap kesulitan dan kehabisan stok. Dampaknya berimbas pada pelayanan yang lambat.

"Kami sudah mengingatkan kepada Disdukcapil kalau itu harus diantisipasi dengan cara membeking jauh-jauh hari. Tapi ternyata belum juga dilakukan," jelas Yayat.

Pria yang akrab disapa Kang Yayat, menegaskan, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon di tahun 2023 akan menguatkan kembali Disdukcapil. Pemerintah daerah sudah mengupayakan untuk melakukan pengadaan blangko e-KTP.

"Kita ingin punya peran penguatan data pelayanan yang efektif. Bikin KTP masih lama, data NIK ganda, itu masih menjadi problem besar. Harus clear di tahun ini," tegasnya.

Dalam anggaran perubahan APBD 2023, Komisi I mendukung anggaran hibah untuk pengadaan e-KTP senilai Rp 1 miliar. Hal itu dilakukan demi memenuhi kekurangan blangko e-KTP. Langkah itu, sudah dikaji matang. Dalam waktu dekat, akan diparipurnakan.

"Sebagaimana hasil kunker kami, di daerah lain ternyata sudah lebih dahulu melakukan itu. Menyisipkan anggaran hibah khusus untuk pembelian blangko e-KTP. Jadi enggak ada lagi kehabisan blangko karena tidak ada anggaran untuk blangko. Kita usahakan di tahun depan tidak akan lagi kejadian seperti ini," tandasnya. •Suf

## Lutfhi: Sosok Pj Bupati Cirebon Harus Miliki Visi Seirama

Diprediksi masa jabatan Bupati Cirebon akan berakhir pada akhir 2023, DPRD berharap sosok Pj Bupati Cirebon punya visi yang sama. Apa saja?



**M**enjelang Pemilihan Umum 2024, sejumlah 15 kepala daerah di Jawa Barat ditengarai akan berakhir masa jabatannya di tahun 2023. Salah satu kepala daerah yang bakal selesai adalah Kabupaten Cirebon.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan aturan baru terkait pengangkatan Penjabat (Pj) Gubernur, Bupati/Walikota melalui Permendagri Nomor 4 Tahun 2023.

Sebagaimana Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 9, pengusulan Pj bupati dilakukan oleh menteri, gubernur dan ketua DPRD kabupaten/kota.

DPRD melalui ketua DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat mengusulkan 3 orang calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota yang memenuhi persyaratan kepada Mendagri.

Mengetahui jabatan Bupati Cirebon akan ber-

akhir, DPRD Kabupaten Cirebon berharap Pj Bupati Cirebon yang terpilih nanti, sosok yang memahami betul persoalan dan pekerjaan rumah saat ini.

Masa akhir jabatan Bupati Cirebon Drs H Imron diperkirakan akan selesai pada Desember 2023. Kosongan posisi bupati tersebut bakal diisi oleh Pj Bupati. Prosesnya, tiga nama usulan dari pemerintah provinsi dan tiga nama usulan dari DPRD Kabupaten Cirebon.

“Kalau saya tentu pertama sosok yang memahami problem-problem persoalan yang ada di Kabupaten Cirebon,” ujar Mohamad Lutfhi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

Harapan kedua, Lutfhi ingin Pj Bupati Cirebon seseorang yang memiliki visi seirama dengan DPRD Kabupaten Cirebon.

“Karena banyak PR yang menanti dan harus segera tuntas. Satu contoh soal sampah, alhamdulillah sudah

on the track. Tinggal lanjutkan,” jelas Lutfhi.

Lutfhi menjelaskan, Cirebon memiliki masalah yang sangat mendasar. Setiap pemangku jabatan harus memiliki tujuan dan visi yang sama untuk kebangkitan Kabupaten Cirebon.

“Saya ingin menyampaikan bagaimana kita semua bisa menyamakan arah gerak untuk masyarakat. Pemerintah daerah, legislatif harus memastikan bergerak ke arah yang sama. Saya yakin dari situ akan mendapatkan hasil yang besar,” jelasnya.

Melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), DPRD telah menghimpun hasil riset dari masalah yang terjadi saat ini di Kabupaten Cirebon.

“Kami sadar, kewenangan kami hanya soal kebijakan, *budgeting*, dan soal pengawasan. Salah satu cara untuk membangun Kabupaten Cirebon dengan kebijakan adalah melalui pokok pikiran kami,” tuturnya.

Oleh karenanya, Politisi PKB ini mensyaratkan, Pj Bupati Cirebon harus mampu menyelesaikan masalah banjir, pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Di mana muaranya adalah meningkatkan produktivitas masyarakat.

“Siapapun Pj yang nanti akan mengisi posisi Bupati Cirebon, kami berharap punya visi yang konkret dalam konteks pengembangan produktivitas Kabupaten Cirebon,” katanya.

Lutfhi menerangkan, Pj Bupati Cirebon tidak harus berasal dari Cirebon. Selama memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Permendagri, maka siapapun diperbolehkan. Namun yang terpenting mampu memahami persoalan dan masalah Kabupaten Cirebon.

“Kalau persyaratan administratifnya enggak sesuai kan susah juga. Ini yang menurut saya



syarat cukup dulu. Setelah itu baru kita masuk ke soal arah dan visi,” terangnya.

Lutfhi juga berharap bila terdapat beberapa calon yang syarat administrasinya memadai, maka prioritaskan mereka yang memiliki visi. “Minimalnya memahami kewilayahan, sudah dan pernah di sini. Jadi yang pasti kita menunggu petunjuk dari Kemendagri terkait dengan akhir masa jabatan,” tuturnya.

Sebagaimana peraturan, Lut-

fhi mengatakan, Bupati Cirebon semestinya berakhir pada Desember 2023. Karena Pilkadanya 2018. Namun ada petunjuk lain yang mengatakan terhitung dari proses pelantikan.

“Sekarang yang pertama kita tunggu jadwal pasti berakhir dulu. Setelah itu pasti kita akan mencoba menginventarisasi nama-nama yang berpeluang dulu. Baru kita inventarisasi dulu. Tapi intinya semua berpeluang,” pungkasnya. •Suf



# Tinjau Pembangunan Destinasi Wisata

Anton meminta pengembang proyek turut membenahi kerusakan jalan akibat kendaraan yang over tonase.



**K**omisi III DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi pembangunan kawasan destinasi wisata di Desa Gebangmekar, Kecamatan Gebang.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Anton Maulana mengatakan, kunker tersebut bertujuan untuk mengaudit kondisi proyek yang tengah dikerjakan oleh salah satu perusahaan. Menurutnya, komisi III mendapat keluhan dari masyarakat mengenai kerusakan jalan yang diduga disebabkan pembangunan destinasi wisata.

Oleh karenanya, Anton menyarankan agar pengembang turut membantu memperbaiki jalan.

"Kami telah menyarankan pada pelaksanaan proyek untuk memperbaiki atau minimal, menambal jalan yang dengan tanah urug," tegasnya usai kunker di Desa Gebangmekar.

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, bila pembangunan destinasi apapun sudah semestinya berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Maka para pengembang maupun pelaksana proyek wajib melihat dampak pengerjaan.

"Pada intinya kami sangat menyambut baik pembangunan yang ada di Kabupaten Cirebon, dengan catatan tidak membuat masalah," jelas Anton.

Sementara itu, Direktur PT Aulia Berlian Konstruksi Rizal mengungkapkan, pembangunan proyek wisata sudah mencapai 72 persen dan ditargetkan selesai pada Oktober 2023 mendatang. "Sudah berjalan sekitar empat bulan pengerjaan ini. Kita targetkan akan selesai secepatnya," ungkapnya.

Rizal mengakui, akses jalan yang dilalui kendaraan proyek sudah memprihatinkan. Ia pun berjanji



akan melakukan pengurangan jalan yang berlubang.

"Sesuai saran dari anggota DPRD, untuk lakukan urugan pada jalan rusak, secepatnya akan kita lakukan," ungkapnya.

Ia pun mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak, khususnya anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang memberikan saran membangun, sehingga pembangunan destinasi wisata ini bisa lebih baik.

"Kami selalu terbuka untuk menerima saran maupun informasi, demi kebaikan bersama," ujar Rizal.

Kabid Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Cirebon Tomy Hendrawan menerangkan, perbaikan dan pemeliharaan jalan dianggarkan di tahun 2024.

"Tahun 2023 tidak ada pemeliharaan maupun peningkatan jalan ini namun sudah kita anggarakan tahun depan senilai Rp 1,9 miliar," terangnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon

prosedur yang harus ditempuh. Terutama kesadaran masyarakat. "Sebagai pengguna jalan, kita juga harus sabar karena semua ada prosedurnya. Tidak bisa langsung geser-geser anggaran," jelas Yoga.

Namun Yoga tetap mendorong agar pemerintah daerah untuk gotong royong berupaya menyelesaikan masalah tersebut.

Kerusakan infrastruktur jalan menjadi isu yang belum terselesaikan. Masyarakat sudah tidak tahan dengan kondisi jalan yang perbaikannya belum menyeluruh. Bahkan ada yang rusak selama bertahun-tahun.

Yoga menilai pengembang perumahan maupun perusahaan memiliki kewajiban untuk membantu perbaikan jalan. Pasalnya, kerusakan jalan juga diakibatkan kendaraan bermuatan material bangunan yang melebihi kapasitas.

"Kami selalu ingatkan bagi para pengembang proyek apapun agar turut bertanggungjawab atas kerusakan jalan yang diakibatkan lalu lintas kendaraan bermuatan material bangunan yang melebihi tonase," tegas Yoga. •Suf



# Inisiasi Raperda Kabupaten Layak Anak

Demi pastikan hak anak terpenuhi oleh payung hukum, DPRD Kabupaten Cirebon memprakarsai rancangan perda layak anak.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan perlindungan terhadap hak anak merupakan prinsip dan upaya untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung. Anak-anak diharuskan terlindung dari eksploitasi atau kekerasan, maupun hak untuk hidup dengan layak.

Meski demikian, turunan payung hukum tersebut sebagai pelaksana Undang-Undang belum dimiliki Pemerintah Kabupaten Cirebon. Merespon hal tersebut, DPRD Kabupaten Cirebon pun menggelar sidang paripurna hantaran terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Cirebon H

Khanafi mengungkapkan beberapa alasan yang melatarbelakangi DPRD mengusulkan raperda KLA.

Pertama, DPRD menilai, anak adalah karunia tuhan yang memiliki hak yang melekat terhadap harkat dan martabat sekaligus. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, memiliki hak kelangsungan hidup, untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi.

Kedua, aspek sosiologis. Politikus Golkar itu mengatakan masih terdapat persoalan yang harus dibenahi di Kabupaten Cirebon, sebelum adanya regulasi yang mendorong tumbuhnya KLA. Ketiga, kurangnya konvensi layak anak karena lemahnya sumber daya manusia, serta minimnya infrastruktur wahana ramah anak.

"Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pencapaian KLA di Kabupaten



Cirebon. Dan itu menjadi alasan DPRD mengusulkan raperda layak anak ini," jelas Khanafi.

Mantan Kuwu Desa Lemahtamba, Kecamatan Panguragan itu juga menyebut, komunikasi dalam keluarga yang menurun serta tingkat ekonomi yang rendah, menjadi penyebab kekerasan terhadap anak.

"Selain itu, pengaruh teknologi informasi, peningkatan pergaulan bebas dan minimnya pemahaman orang tua terhadap bimbingan yang benar terhadap anak, turut menjadi penghambat pencapaian

tersebut," ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, menjaga hak anak merupakan tanggung jawab penting bagi masyarakat dan pemerintah. Bukan hanya untuk kesejahteraan anak-anak secara langsung, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, berkelanjutan, dan berbudaya.

Berdasarkan hal tersebut, menurutnya, implementasi KLA memerlukan kebijakan positif dengan pendekatan komprehensif kepada kelompok anak atau

keluarga. Baik dari sisi hak maupun perlindungan kesehatan terhadap anak

"Atas beberapa pertimbangan itu, kami mengajukan Perda penyelenggaraan KLA atas prakarsa DPRD Kabupaten Cirebon," pungkasnya.

Di waktu terpisah, Bupati Cirebon Imron menyampaikan, apresiasi terhadap raperda inisiatif DPRD sebagai bentuk tindak lanjut dari program pembentukan daerah yang telah disepakati bersama antara DPRD dan Pemkab Cirebon.

"Kami tentu mengapresiasi karena raperda ini juga menjadi jawaban atas banyaknya kasus kekerasan terhadap anak," ujar Imron saat rapat paripurna, Rabu, 23 Agustus 2023.

Imron menyambut baik adanya raperda inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan KLA sebagai langkah menyinergikan seluruh sistem pembangunan berbasis hak anak.

Ia mengatakan, melalui integrasi komitmen dan sumber daya dari semua unsur pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Cirebon akan terwujud.

Imron menuturkan, mewujudkan Kabupaten Cirebon sebagai kabupaten layak anak adalah kewajiban bersama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, tentang kebijakan kabupaten atau kota layak anak.

"Kami berharap dalam pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut akan terjalin kerjasama yang baik, serta dapat berlangsung secara insentif dan lancar," tuturnya. •Mir

## Mangrove Pengarengan Segera Hadirkan Wisata Edukasi

Tak hanya berguna untuk tangkal abrasi. Di tangan Jay, keberadaan Hutan Mangrove Pengarengan disulap jadi wadah edukasi wisata. Seperti apa?



**B**erada di lokasi bibir pantai utara Cirebon, membuat Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, membutuhkan perlindungan dari abrasi.

Semula Jaynudin, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) hanya ingin mencegah terjadinya abrasi laut. Ia bersama komunitasnya pun bersama-sama menyepakati untuk menanam mangrove di sepanjang bibir laut. Lambat laun, Jay sapaannya, menyadari bahwa, hutan mangrove merupakan satu potensi wisata yang dapat mendatangkan wisatawan.

Di tangan Jay, sumber daya alam mangrove disulap tak hanya sebatas cegah abrasi melainkan sebuah wisata edukasi.

“Kalau daerah pesisir identik dengan mangrove.

Dan memang potensi di Desa Pengarengan setahu saya hanya ini. Makanya kami ingin punya wisata laut,” ujar Jay.

Belum lama ini, Hutan Mangrove Pengarengan ini telah diresmikan secara simbolis oleh Bupati Cirebon dan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

Jay menjelaskan, Hutan Mangrove Pengarengan masih dalam kategori pengembangan wisata. Beberapa fasilitas telah tersedia seperti taman, rumah makan, tempat pembibitan mangrove, jalan dan sarana pendukung lainnya.

Jay mengungkapkan, Hutan Mangrove Pengarengan diinisiasi oleh kelompok wisata dengan bantuan dari PT Cirebon Power melalui anggaran Corporate Social Responsibility (CSR).



“Memang kita didanai 100 persen dari PT Cirebon Power. Kalau Pemdes Pengarengan baru suport moril karena belum punya anggaran,” ungkap Jay.

Meski telah diresmikan, Jaynudin mengatakan, Hutan Mangrove Pengarengan masih akan dikembangkan untuk menunjang keamanan dan kenyamanan pengunjung.

Di antaranya, Jaynudin akan mengatur biaya tiket masuk wisata serta menyediakan lahan parkir. Selain itu, Jay juga

berkeinginan mewadahi para pelaku UMKM desa agar bisa berjualan di sekitar lokasi. Ada juga spot selfi di taman dan di tengah hutan Mangrove.

Sejauh ini, Jay menerangkan, Hutan Mangrove Pengarengan baru 10 persen dari rencana pembangunan. Kedepan akan dibangun jembatan dan lorong kecil di tengah hutan untuk penghubung beberapa lokasi mangrove.

“Ya sekarang belum seideal yang kita rencanakan karena masih tahap pengembangan. Na-

mun kita targetkan tahun depan pembangunan selesai 100 persen,” terangnya.

Harapan mempercepat pembangunan wisata mangrove juga telah direspon Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon Drs Imron mengapresiasi apa yang dilakukan Pokdarwis Desa Pengarengan meski masih banyak hal yang harus diperbaiki. Imron berjanji akan membantu pembangunan Hutan Mangrove Pengarengan.

“Banyak yang harus diperhatikan dari mulai jalan sampai kebersihan yang harus ditingkatkan lagi. Dan kami akan mencoba menganggarkan untuk wisata mangrove ini dalam APBD 2023,” ujar Imron.

Imron mengajak agar masyarakat dan sejumlah perusahaan saling membantu dan berperan aktif mengembangkan Hutan Mangrove Pengarengan.

“Kami ajak perusahaan dan dinas untuk ikut serta membantu wisata ini. Kami juga akan berkoordinasi dengan BBWS untuk pembenahan sungai di sini,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi mengingatkan agar Pemkab Cirebon benar-benar mendukung terhadap objek wisata desa seperti di Desa Pengarengan. Luthfi menilai, dengan hadirnya wisata desa tentu akan beriringan dengan peningkatan ekonomi.

“Itu bahkan sesuai dengan keinginan kita semua agar potensi wisata yang ada di Kabupaten Cirebon benar-benar bisa kita garap. Bupati harus *support*. Tadi kita lihat sepanjang jalan ke arah sini masih rusak. Kita harus bersama-sama membangun akses yang nyaman agar wisatawan pun mau berdatangan,” tandas Luthfi. •Kus

## Ciawijapura Akan Punya Bank Sampah

Pemdes Ciawijapura mulai berbenah dalam mengentaskan sampah. Direncanakan akan punya Bank Sampah. Seperti apa?



Sebelum hampir di setiap sudut jalan Desa Ciawijapura, Kecamatan Susukan Lebak, terlihat sangat kotor karena tumpukan sampah. Tak heran banyak warga yang mengeluh akan kondisi tersebut. Namun sejak akhir tahun lalu, Pemdes Ciawijapura mulai berbenah. Mereka membuat program pengentasan sampah.

Setiap Sabtu pagi, jajaran perangkat desa akan rutin menyisir jalan dengan melakukan kegiatan bersih-bersih.

"Sejak dua bulan lalu kami mulai membersihkan sampah-sampah dengan dibantu warga

dan para pemuda desa," ujar Kuwu Desa Ciawijapura Ade Sri Sumartini.

Tak hanya jalan, pembersihan sampah juga menyasar keTPS. Selain itu, Ade juga mulai mengatur pengangkutan sampah rumah tangga.

Ade menugaskan karang taruna desa untuk menjadi petugas pengangkut sampah dari rumah menuju TPS. Untuk membiayai itu, warga ditarik iuran Rp 30 ribu dalam sebulan yang dialokasikan untuk operasional dan transportasi.

"Pemdes belum menganggarkan di bidang persampahan. Jadi untuk

saat ini pemdes baru bisa melakukan pengangkutan dari rumah warga ke TPS saja," ungkapnya.

Sejauh ini, lebih dari 100 rumah warga telah rutin memakai jasa angkut sampah. Ade mengatakan, ke depan pengelolaan sampah ini akan dilimpahkan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan mendirikan Bank Sampah.

Bank Sampah akan memberi manfaat kepada warga, dan mendorong pemilahan sampah organik dan non organik sejak dari rumah.

"Setiap pengumpulan sampah akan dicatat oleh Bumdes sesuai dengan harga sampah yang akan ditukarkan," jelas Ade.

Setelah mencapai nominal yang diinginkan, warga akan diberikan kupon sesuai dengan harganya. Setelah itu, warga bisa menukarkan kupon tersebut dengan sembako berdasarkan nominalnya.

"Misalnya untuk menukar dengan minyak warga harus mengumpulkan sampah sesuai dengan harga minyak tersebut," kata Ade.

Meski belum mampu mengentaskan sampah secara menyeluruh, setidaknya upaya penyelesaian sampah sedikit-demi sedikit mulai teratasi. "Kami tentu belum optimal untuk mengentaskan secara menyeluruh. Tapi ini upaya yang memang harus kita lakukan untuk mengurai sampah sejak dari desa," pungkasnya. •Soy

## Kamarang Bakal Sughkan Wisata Pertanian

Sebuah konsep wisata pertanian yang memadukan tradisional dan modern tengah dibangun Pemdes Kamarang. Belum apa-apa, sudah datangkan wisatawan?

Tak banyak yang tahu, jika Desa Kamarang, Kecamatan Greged memiliki potensi wisata alam yang sangat luar biasa. Alhasil, Pemdes Kamarang tengah bergeliat mengembangkan potensi ekonomi melalui wisata yang tengah dibangun.

Kuwu Desa Kamarang Endang mengatakan, sektor wisata akan menjadi cara pemdes memulihkan ekonomi warga setelah pandemi.

Agro Edu Wisata (AEW) atau wisata edukasi pertanian sedang digarap di atas tanah 2 hektare. Agro Edu Wisata merupakan wisata edukasi tentang pertanian zaman tradisional dengan zaman modern seperti sekarang.

"Nantinya pengunjung akan kembali ke alam, mengenal sawah dengan terjun langsung. Dan secara modern kita akan memanfaatkan internet optik sebagai pengendali pemanfaatan pupuk, air hingga pemusnah hama," ujar Endang.

Selain itu, sebuah pusat kuliner berkonsep *fresh for farm* atau makanan langsung pertanian akan disediakan di lokasi AEW bersamaan spot selfi dan beragam aksesoris wisata.

"Poin utamanya wisata ini benar-benar menghadirkan alam pertanian yang indah," jelas Endang.

Saat ini, Pemerintah Desa Kamarang sudah mengenalkan agro edu wisata melalui penjualan pa-



ket wisata. Paket wisata tersebut meliputi pembelajaran pertanian, peternakan, serta *homestay*.

"Karena kita ingin memajukan ekonomi warga, maka rumah warga juga akan disewakan untuk *homestay* wisatawan," ungkapnya.

Untuk satu paket wisata, Pemdes Kamarang mematok harga Rp 300 ribu per orang. Dengan harga tersebut, para wisatawan akan mendapatkan keindahan agro edu wisata dari pembelajaran alam, penginapan, kesenian dan makanan.

"Kemarin kita sudah kedatangan orang Jakarta seban-

yak 2 bus. Untuk satu paket mereka bisa menikmati selama sehari 2 malam dan menginap di *homestay* yang telah disediakan," kata Endang.

Selain agro edu wisata, Desa Kamarang juga memiliki wisata *outbond* yang terletak di sekitar bukit. Para wisatawan akan dimanjakan dengan beragam permainan tradisional dan modern.

"Baik agrowisata dan *outbond* kita punya harapan akan dapat mendatangkan banyak pengunjung sehingga mampu meningkatkan pendapatan desa dan warga," pungkasnya. •Kus

## Dawuan

# Tahun Depan Punya 40 Kios

Pembangunan kios mulai digenjut untuk benahi wajah Desa Dawuan. Target selesai di tahun 2024. Apa keuntungannya?



Pasca dilantik sebagai orang nomor wahid di Desa Dawuan, Kecamatan Tengahtani, pada 2021 silam, Amiruddin, kuwu Desa Dawuan mewacanakan program pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan membangun 40 kios bagi masyarakat.

Kuwu yang belum genap dua tahun menjabat itu mengungkap, sejumlah alasan mengapa pembangunan kios menjadi skala prioritas. Menurutnya, ada tiga manfaat yang kelak dirasakan masyarakat bila terealisasi.

Pertama, keberadaan kios

akan mengurangi kemacetan. Pasalnya keberadaan pedagang yang belum terwadahi menimbulkan kemacetan dan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemdes Dawuan.

Para pedagang yang berada di sepanjang titik kemacetan akan direlokasi ke tempat baru agar wajah desa lebih tertata rapi. Pembangunan kios tersebut, diharapkan mampu menggeliatkan ekonomi Desa Dawuan secara mandiri.

Terlebih, desa ini dihuni 9.000 jiwa dan menjadi salah satu area terpadat saat hari kerja. Semen-

tara, infrastruktur jalan yang kurang memadai tidak dapat menampung mobilitas kendaraan. Walhasil, kemacetan lalu lintas pun tak dapat dihindari.

"Selain volume kendaraan dan sempitnya jalan, keberadaan pedagang menjadi salah satu penyebab sering terjadi kemacetan," ujar Amiruddin.

Kedua, Amiruddin menacangkan kehadiran kios akan menjadi salah satu lumbung Pendapatan Asli Desa (PADes). Ia mengakui, aset yang dimiliki Desa Dawuan saat ini masih kurang produktif. Lahan titisara yang digadang-gadang menjadi penyumbang PADes nyatanya tidak bisa diandalkan. Banjir yang melanda saat musim penghujan dan kekeringan saat kemarau, memaksa ia memutar otak demi menggali PADes.

Terakhir, sebagai instrumen penggerak sektor ekonomi. Dirinya menjelaskan, sektor ekonomi menjadi salah satu program prioritas yang harus segera diselesaikan sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca covid. Karenanya, progres pembangunan 40 kios terus digenjut.

"Proses pengurusan sudah berjalan, mudah-mudahan tidak ada kendala bertarti selama tahapan berjalan. Insya Allah selesai di tahun 2024 mendatang, mohon do'anya," pungkasnya. •Mir

## Bakung Lor

# Bersiap Jadi Desa Mandiri

Berbagai upaya agar naik kelas menjadi desa mandiri tengah dilakukan Pemdes Bakung Lor. Salah satunya peningkatan UMKM tape. Seperti apa?

Menyandang gelar sebagai desa mandiri merupakan prestasi yang diinginkan setiap pemimpin di lingkup desa. Tak terkecuali bagi Watma, Kuwu Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon.

Menjadi orang nomor satu di desa berjudul 'Bakung Alas' itu, Watma bertekad membawa Desa Bakung Lor menjadi desa mandiri dari semula desa berkembang di sisa akhir masa jabatannya.

Meski tak mudah, Watma mengatakan, akan terus bekerja dan memusatkan perhatiannya terhadap program-program pembangunan sebagaimana visi Desa Bakung Lor.

"Kita ingin membawa Desa Bakung Lor dapat mandiri, religius, sejahtera, inovatif, tertib dan aman. Kami menamakannya Marsita," ujarnya.

Untuk mencapai itu, Watma pun mendorong para pelaku usaha di Desa Bakung Lor agar membangun sentra oleh-oleh. Selanjutnya dijual untuk pariwisata terpadu di Kecamatan Jamblang.

Watma mengatakan, Pemdes Bakung Lor secara aktif mendorong pelaku UMKM untuk terus berinovasi mengembangkan produksi makanan rumah khususnya kudapan yang berbahan dasar tape ketan.



"Kebetulan di daerah kami produk unggulan UMKM itu tape ketan. Dan itu sudah dikenal luas," ungkap Watma.

Tak hanya meningkatkan UMKM, peningkatkan kesejahteraan di bidang pertanian pun tak luput dari perhatian Pemdes Bakung Lor. Watma mengaku, sedang menggenjut progres pembangunan embung bagi para petani agar tak lagi kesulitan mengairi sawah terutama saat kemarau tiba.

Selain untuk mendistribusi pasokan air, embung tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai pilihan destinasi wisata baru di Desa Bakung Lor.

"Kemarin sudah kita lakukan pengurusan dan rencananya mau kita sender. Semoga tahun depan dapat terlaksana," ungkapnya.

Perbaikan kinerja perangkat desa disertai pembangunan sejumlah sarana terus diakselerasi agar Desa Bakung Lor segera naik kelas menjadi desa mandiri. Melalui usaha-usaha tersebut, Watma berharap seluruh program kerjanya dapat membawa manfaat untuk Desa Bakung Lor di masa mendatang.

"Saya hanya punya harapan di sisa jabatan bisa memberi peninggalan yang bisa bermanfaat untuk terus dikembangkan," tandas Watma. •Mir



## Mental Pariwisata

**D**i Majalah Cirebon Katon Edisi Oktober 2021, saya menulis soal rasa wisata. Di tulisan itu, saya menekankan betapa pentingnya mempersembahkan rasa kepada wisatawan. Tidak usahlah berniat menata pariwisata, jika tak memahami nilai di balik rasa. Karena rasa itulah yang ingin dinikmati wisatawan. Lantas darimana rasa itu bisa dihadirkan?

Rasa itu hadir dari insan pariwisata, terutama birokrat, yang bermental pariwisata. Jika mental ini tidak menginternalisasi pada setiap diri aparatur, maka lupakanlah bicara soal penataan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Cirebon.

Jika aparatur pariwisata hanya berpikir bagaimana caranya menghabiskan anggaran, tanpa peduli rasa wisata dan kualitas belanja, maka jangan harap potensi pariwisata Kabupaten Cirebon dapat dikelola dengan baik.

Dengan begitu lupakan juga keinginan pemerintah membuat Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) dalam bentuk Perda. Beberapa kali Raperda ini singgah ke meja saya, berulang kali juga saya koreksi dan minta diperbaiki.

Dalam Raperda tersebut, saya belum merasakan adanya rancangan peraturan yang ingin membuahakan rasa untuk dipersembahkan kepada wisatawan. Raperda itu belum lahir dari perenungan yang mendalam dari seseorang atau tim yang berjiwa wisata. Kesan asal kerjaan selesai dan hasil salin-tempel (*copy paste*) lebih kentara.

Lantas seperti apakah karakteristik birokrat pariwisata? Ia harus memiliki pemahaman yang kuat tentang industri pariwisata, termasuk tren, tantangan, dan peluangnya. Juga mengetahui detail destinasi wisata, budaya, dan aset pariwisata lokal.

Birokrat pariwisata harus mampu merencanakan dan mengelola program-program pariwisata yang efektif, baik dari sisi perencanaan promosi, manaje-

men aset pariwisata, dan alokasi sumber daya. Jika perencanaan promosi tidak terintegrasi, maka itu gambaran betapa jauh panggang dari api.

Birokrat pariwisata juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, komunitas lokal, dan wisatawan. Jika menata Kawasan Wisata Religi Gunung Jati saja masih 'berantem' terus, maka segerakan 'belajar membangun jembatan, bukan tembok'.

Pariwisata adalah wilayah kreatif. Kreativitas akan melahirkan produk dan promosi wisata yang inovatif. Karena itulah insan pariwisata adalah orang-orang yang bermental bahagia dan memancarkan energi positif. Bukan sebaliknya: kaku, tak peduli, intimidatif, dan arogan.

Di era big data ini, kemampuan membaca dan menganalisis data menjadi kunci persaingan pariwisata, baik secara nasional maupun internasional. Kemampuan ini akan memudahkan memahami tren wisatawan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data dan bukti yang kuat.

Industri pariwisata selalu berubah, jadi seorang birokrat pariwisata yang efektif harus siap untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru dalam industri ini. Teknologi informasi bisa sangat membantu untuk akses dinamisasi ini, juga untuk kegiatan promosi dan keparipurnaan pelayanan.

Terakhir, birokrat pariwisata harus memiliki kemampuan mengelola krisis dan merespons dengan cepat. Industri pariwisata termasuk rentan terpengaruh oleh faktor eksternal, seperti bencana alam, keamanan, atau perubahan kebijakan nasional maupun regional.

Setelah melihat deretan karakteristik dan mental pariwisata di atas, menjadi birokrat pariwisata itu berat ya? Kalau kata anak zaman *now*: Kena 'mental' nih? Makanya, bangun mental pariwisatamu, biar *gak* kena 'mental' terus.



**SEKRETARIS DPRD  
DAN SELURUH PEGAWAI**  
Mengucapkan



Selamat Merayakan  
**Maulud  
Nabi SAW**

12 Rabiulawal 1445 H



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON

Selamat Memperingati

Maulid Nabi  
Muhammad SAW

12 Rabiul Awal 1445 H